

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Kebijakan Kepatuhan Global

Agustus 2023

PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Antikorupsi ("Kebijakan") ini adalah untuk membantu memastikan kepatuhan Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") dan afiliasinya ("Perusahaan") terhadap undang-undang antikorupsi global yang berlaku. Hukum tersebut termasuk Undang-undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977, yang telah diamandemen, ("FCPA" atau "Undang-Undang") dan undang-undang setempat lainnya yang berlaku di negara tempat FCX beroperasi, baik yang berlaku untuk transaksi di sektor publik, sektor swasta, maupun keduanya.

Undang-undang antikorupsi ini melarang suap di luar Pejabat Pemerintah Non-AS (untuk selanjutnya disebut "Pejabat Pemerintah"). FCPA secara khusus melarang warga dan perusahaan Amerika Serikat, pejabat, direktur, karyawan, dan agen mereka, serta setiap pemegang saham yang bertindak atas nama mereka, untuk menyuap Pejabat Pemerintah. FCPA juga mewajibkan perusahaan Amerika Serikat untuk menyimpan pembukuan dan catatan yang akurat dan lengkap serta menerapkan kontrol akuntansi internal yang baik.

Semua personel Perusahaan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan diharapkan untuk menjalankan bisnis Perusahaan secara legal dan beretika. Penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan yang melanggar hukum, tidak wajar atau tidak beretika adalah dilarang. Hadiah, pembayaran, atau penawaran yang tidak wajar dalam bentuk apa pun yang berharga kepada Pejabat Pemerintah atau mitra usaha juga bisa membahayakan pertumbuhan dan reputasi Perusahaan. Sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip Perilaku Bisnis FCX dan Kode Perilaku Mitra Bisnisnya, FCX melarang penyuapan terhadap Pejabat Pemerintah atau mitra usaha dan mengharapkan kepatuhan penuh terhadap semua undang-undang antikorupsi yang berlaku, termasuk FCPA, oleh semua yang mengatasnamakan Perusahaan.

Selanjutnya, FCX mengharapkan afiliasinya untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang mendidik karyawannya tentang undang-undang antikorupsi setempat yang berlaku, dan dirancang untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, berdasarkan profil risiko khusus dari afiliasi.

Tentang Kebijakan ini

Kebijakan ini berlaku untuk FCX dan anak perusahaannya, serta untuk setiap usaha patungan FCX atau badan usaha lain yang dimiliki oleh FCX atau anak perusahaan FCX secara mayoritas (secara kolektif disebut "Perusahaan").

Kebijakan ini mencakup *semua* operasional Perusahaan di wilayah di dalam maupun luar negeri, termasuk operasi yang dilakukan oleh setiap divisi, departemen, anak perusahaan, agen, konsultan atau perwakilan lainnya, serta operasi dari setiap usaha patungan atau perusahaan bisnis lainnya di luar Amerika Serikat yang secara mayoritas dimiliki oleh Perusahaan. Kebijakan ini juga mencakup semua aktivitas pencatatan keuangan Perusahaan.

Dalam tanggung jawab pekerjaan sehari-hari, kita sering berhubungan dengan Pejabat Pemerintah. Sebagai contoh, memperoleh hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan aset tambang - baik melalui penyerahan penawaran bidding, negosiasi langsung dengan pemerintah asing atau membeli konsesi yang ada - mungkin memerlukan persetujuan pemerintah. Konstruksi besar untuk proyek baru sering kali membutuhkan izin. Begitu juga barang dan peralatan yang digunakan dalam operasi dan produk kita yang secara teratur melewati bea cukai. Operasi kita juga sangat diatur dalam bidang lingkungan. Di beberapa negara, Pejabat Pemerintah mungkin meminta—secara langsung atau tidak langsung—pembayaran yang tidak wajar sehubungan dengan operasi Perusahaan. Ini semua adalah contoh situasi yang membutuhkan kewaspadaan kita dalam mematuhi undang-undang antikorupsi.

Jika tanggung jawab pekerjaan Anda menghadapkan Anda pada area yang tercakup undang-undang antikorupsi yang terkait, pastikan Anda memahami Pedoman Kepatuhan Antikorupsi Perusahaan, yang menjelaskan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara terperinci. Pedoman ini diposting di situs [Web FM](#) agar bisa diakses dengan mudah. Banyak operasi Perusahaan di luar AS perlu mengadopsi kebijakan setempat untuk menerapkan kebijakan ini dan Pedoman untuk mematuhi undang-undang antikorupsi setempat dan menyediakan prosedur untuk meninjau dan menyetujui transaksi yang meningkatkan risiko antikorupsi, seperti pembayaran kepada pejabat asing dan pemerintah.

Kebijakan ini menggantikan kebijakan versi 2017.

1 RINGKASAN FCPA

1.1 Pembayaran yang dilarang

Ketentuan antisuap FCPA melarang menyuap Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan yang tidak wajar. Secara khusus, FCPA melarang membuat, menawarkan, menjanjikan, atau mengesahkan hadiah, pembayaran, atau apa pun yang berharga, dengan maksud korupsi, kepada Pejabat Pemerintah. FCPA tidak membuat pengecualian untuk kasus di mana pejabat meminta atau memohon pembayaran yang tidak wajar. Untuk tujuan kebijakan ini, “Pejabat Pemerintah” mencakup semua yang berikut ini:

Jenis Pejabat Pemerintah	Contoh
Pejabat atau karyawan lembaga pemerintah nasional, regional, lokal, atau lainnya dari lembaga pemerintah	Inspektur bea cukai, pejabat kepolisian atau menteri
Pejabat yang terpilih	Walikota, legislator atau anggota dewan
Pejabat atau pegawai dari perusahaan BUMN atau yang dikontrol oleh BUMN	CEO perusahaan pertambangan Cina
Orang pribadi yang bertindak untuk sementara dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama entitas pemerintah mana pun	Konsultan pemerintah yang bertindak di bawah otoritas pemerintah
Kandidat untuk jabatan politik atau pemerintahan yang terpilih	Calon anggota DPRD setempat

Partai politik atau pengurus partai	Ketua partai politik setempat
Pejabat, karyawan, atau perwakilan dari organisasi publik internasional	Karyawan Bank Dunia, Inter-American Development Bank atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
Anggota keluarga dari salah satu yang tercantum di atas	Suami/Istri dari Menteri Pertambangan

Seperti yang dijelaskan dalam daftar di atas, ada banyak jenis Pejabat Pemerintah selain pejabat yang terpilih. Pejabat Pemerintah bisa ada di setiap tingkat pemerintahan, baik lokal, regional maupun nasional.

FCPA melarang pembayaran langsung dan tidak langsung kepada Pejabat Pemerintah. Artinya Perusahaan dan individu yang terlibat bisa diminta pertanggungjawaban berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh karyawan FCX atau yang dilakukan oleh pihak ketiga. "Pihak ketiga" termasuk konsultan, agen, kontraktor, dan individu atau entitas lain yang mewakili FCX di hadapan otoritas atau pejabat pemerintah yang berhubungan dengan pemerintah atas nama Perusahaan. Contoh pihak ketiga termasuk:

- Agen lisensi;
- Penyedia layanan outsourcing;
- Agen atau pejabat yang berhubungan dengan petugas bea cukai atas nama perusahaan;
- Konsultan hubungan dengan pemerintah;
- Konsultan dipertahankan untuk membantu mendapatkan izin atau lisensi; dan
- Pengacara, akuntan dan penasihat pajak dari luar yang berhubungan dengan Pejabat Pemerintah.

Untuk mematuhi ketentuan FCPA, Kebijakan ini menetapkan aturan yang jelas: karyawan, pihak ketiga, dan mitra bisnis tidak boleh membuat, menawarkan, menjanjikan, atau mengizinkan hadiah, pembayaran, atau apa pun yang berharga kepada Pejabat Pemerintah. Berdasarkan aturan ini, pembayaran juga tidak boleh dilakukan, ditawarkan atau dijanjikan kepada pihak ketiga mana pun yang kemungkinan akan memberikan hadiah, pembayaran, atau mengalihkan barang lainnya yang berharga kepada Pejabat Pemerintah. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah untuk pembayaran yang secara khusus diizinkan oleh Kebijakan ini, atau pembayaran yang telah disahkan berdasarkan pedoman, kebijakan, atau prosedur yang berlaku dari FCX atau afiliasinya, sesuai dengan Kebijakan ini.

12 Pembayaran yang diizinkan

FCPA mengizinkan jenis pembayaran tertentu kepada Pejabat Pemerintah dalam situasi yang sangat terbatas. Misalnya, berbagai jenis biaya promosi bisa diizinkan berdasarkan FCPA dalam keadaan tertentu yang tidak korup. Sebagai contoh, pengeluaran dengan iktikad baik yang dikeluarkan saat mempromosikan Perusahaan kepada Pejabat Pemerintah, menyelenggarakan tur Pejabat Pemerintah di fasilitas Perusahaan, atau menjamu mereka bisa diizinkan. Namun, perlu berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan jenis kegiatan ini untuk memastikan kegiatan tersebut tidak melibatkan kegiatan atau keuntungan yang tidak wajar. Jangan memberikan hadiah atau jamuan kepada Pejabat Pemerintah atau mengesahkan pengeluaran atau acara promosi untuk Pejabat Pemerintah tanpa mengikuti Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi Perusahaan, semua kebijakan dan prosedur setempat serta mendapatkan persetujuan yang semestinya.

Walaupun FCPA mengizinkan pembayaran “uang pelicin” tertentu kepada Pejabat Pemerintah untuk bisa mendapatkan tindakan pemerintah yang non-diskresi, rutin, dan legal¹, pembayaran semacam ini mungkin tidak diizinkan menurut undang-undang lain yang berlaku dan dapat menimbulkan banyak masalah yang rumit. **Untuk alasan ini, berdasarkan Kebijakan ini, pembayaran uang pelicin dilarang.**

Semua biaya, termasuk biaya promosi, harus dijelaskan secara lengkap dan akurat dalam pembukuan dan catatan kita dan dalam rekening yang ditunjuk.

¹ Tindakan tersebut termasuk mendapatkan izin rutin untuk berbisnis di negara asing, meminta perlindungan polisi atau memproses visa, faktor bea cukai, atau dokumen pemerintah lainnya dalam keadaan baik.

13 Praktik pencatatan, akuntansi dan pelaporan

Ketentuan pencatatan pada FCPA mewajibkan perusahaan publik Amerika Serikat seperti FCX untuk menyimpan pembukuan, catatan, dan akun yang lengkap dan akurat serta secara wajar mencerminkan semua transaksi dan disposisi aset dengan perincian yang wajar.

Pengubahan atau penghilangan transaksi apa pun dalam pembukuan kita, atau kegagalan untuk mengontrol akuntansi yang benar yang mengakibatkan perubahan atau penghilangan adalah dilarang. Oleh karena itu, menyimpan keterangan terperinci dan akurat dari semua pembayaran dan pengeluaran adalah sangat penting.

Kita semua harus mengikuti standar, prinsip, undang-undang, dan praktik Perusahaan yang berlaku untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Tepat waktu dan lengkap ketika menyiapkan semua laporan dan catatan yang dibutuhkan oleh manajemen. Dalam berhubungan dengan Pejabat Pemerintah, dan dalam transaksi lain yang dijelaskan dalam Kebijakan ini, minta semua persetujuan yang dibutuhkan secara tertulis. Kemudian, berikan dokumentasi tersebut ke pengawas setempat untuk dilakukan pencatatan yang benar. Sebelum membayar atau mengesahkan pembayaran kepada Pejabat Pemerintah, pastikan tidak ada bagian dari pembayaran tersebut yang digunakan untuk tujuan apa pun selain yang dijelaskan secara lengkap dan akurat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan. Tidak boleh ada akun Perusahaan yang dirahasiakan atau tidak tercatat untuk tujuan apa pun. Akun palsu atau akun buatan adalah dilarang.

Setiap pembayaran kepada, atau biaya promosi untuk, Pejabat Pemerintah harus diperiksa dengan cermat dan dicatat dengan benar. Mungkin item baris dibuat terpisah untuk mencatat transaksi ini dengan tepat dan semua dokumentasi pendukung harus disimpan untuk tujuan audit. Pedoman Kepatuhan Antikorupsi menjelaskan persyaratan pelaporan khusus untuk transaksi yang diizinkan, seperti biaya promosi untuk Pejabat Pemerintah.

Dana pribadi tidak boleh digunakan untuk melakukan semua yang dilarang oleh kebijakan Perusahaan.

14 Mitra bisnis perusahaan

Perusahaan akan bersaing dalam mendapatkan semua peluang bisnis dengan gigih, adil dan legal, serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka. Apa pun tekanan dari Pejabat Pemerintah, Perusahaan akan menjalankan bisnis hanya dengan cara yang legal dan beretika. Praktik bisnis yang adil dan profesional ini harus mencakup aktivitas pihak ketiga Perusahaan, konsorsium dan mitra usaha patungan. Berhati-hatilah untuk menghindari situasi yang melibatkan pihak ketiga ini atau jenis pihak ketiga lainnya yang bisa mengarah pada pelanggaran FCPA. Sebelum mengikat perjanjian dengan pihak ketiga mana pun, pastikan uji kelayakan berbasis risiko telah dilakukan sesuai prosedur orientasi vendor Perusahaan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan Freeport Compliance eXchange (FCeX) dan platform penilaian pihak ketiga Ariba. Risiko korupsi dan kepatuhan lainnya (misalnya, pemberian sanksi) termasuk negara tempat beroperasi, jenis bisnis, kepemilikan (termasuk kepemilikan manfaat) dimasukkan dalam proses penilaian risiko Perusahaan.

15 Hukuman dan konsekuensi dari ketidakpatuhan

FCPA membebankan tanggung jawab pidana kepada individu dan perusahaan. Bagi individu yang melanggar ketentuan antisuap FCPA, sanksi pidananya termasuk:

- Denda yang sangat besar;
- Disgorgement manfaat;
- Kurungan penjara hingga lima tahun per pelanggaran; dan
- Hukuman lainnya.

Jaksa juga bisa menggunakan ketentuan akuntansi dalam FCPA atau dalam undang-undang pidana Amerika Serikat lainnya, seperti undang-undang konspirasi dan pencucian uang, yang juga menetapkan hukuman yang berat. Perusahaan tidak boleh mengganti biaya denda yang dikenakan kepada individu. Perusahaan juga bisa dikenakan denda yang besar dan hukuman perdata, dan mungkin juga diminta mengembalikan keuntungan dari bisnis yang dianggap tidak wajar.

Ada banyak akibat negatif lainnya dari pelanggaran FCPA. Investigasi atas dugaan pelanggaran memakan waktu lama dan sumber daya manajemen yang besar untuk menyelesaikannya, bahkan meskipun hasil akhirnya dimenangkan. Investigasi di negara Amerika Serikat bisa memicu investigasi di negara lain, dan sebaliknya. Hukuman tambahan mungkin dikenakan berdasarkan undang-undang negara di luar Amerika Serikat. Reputasi serta hubungan masyarakat perusahaan maupun individu bisa sangat rusak akibat dugaan pelanggaran FCPA.

Pelanggaran FCPA juga akan mengakibatkan tindakan disiplin oleh Perusahaan, hingga dan termasuk pemecatan.

2 TANGGUNG JAWAB KARYAWAN DAN MITRA BISNIS YANG TERLIBAT DALAM URUSAN INTERNASIONAL

Setiap—karyawan, agen, dan mitra bisnis lainnya—yang tugasnya cenderung mengarah pada keterlibatan atau paparan salah satu bidang yang tercakup oleh FCPA dan undang-undang antikorupsi lainnya yang berlaku, dengan harapan akan memahami serta mematuhi Kebijakan ini dan Pedoman Kepatuhan Antikorupsi, serta kebijakan dan prosedur setempat. Sertifikasi kepatuhan berkala akan diperlukan, demikian juga partisipasi dalam sesi pelatihan dari waktu ke waktu.

3 MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MELAPORKAN KEKHAWATIRAN

Jika Anda merasa khawatir bahwa suatu kebijakan telah dilanggar, atau memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, seperti transaksi dengan Pejabat Pemerintah, atau praktik pembayaran, Anda harus membicarakannya dengan atau menghubungi salah satu dari pejabat berikut ini:

- **Supervisor atau manajer Anda;**
- **Manajemen tingkat berikutnya;**
- **Perwakilan Sumber Daya Manusia setempat Anda;**
- **Petugas Kepatuhan setempat Anda:**
Orang yang ditugaskan untuk wilayah Anda, bisa dihubungi di situs intranet lokal Anda;
- **Salah satu Pejabat Kepatuhan yang ditunjuk:**
602-366-7550 atau melalui email di compliance_officer@fmi.com.

- **Tim Kepatuhan Global:**
compliance@fmi.com;
- **Saluran Kepatuhan FCX:**
Nomor telepon untuk wilayah Anda bisa dihubungi di situs intranet lokal Anda. Pelaporan anonim diperbolehkan.
- **[Portal Pelaporan Kepatuhan lewat Web FCX:](https://fcxcompliance.ethicspoint.com)**
<https://fcxcompliance.ethicspoint.com>

Mitra bisnis juga bisa membicarakan pertanyaan atau melaporkan kekhawatiran melalui salah satu saluran di atas.

Catatan: Perusahaan tidak akan menoleransi pembalasan terhadap karyawan mana pun yang secara wajar dan dengan iktikad baik menyampaikan pertanyaan atau masalah tentang praktik bisnis Perusahaan atau kepatuhan terhadap undang-undang atau regulasi yang berlaku, atau karena menggunakan Saluran Kepatuhan FCX.

4 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERKAIT

Silakan lihat daftar kebijakan dan prosedur terkait di bawah ini:

- [Pedoman Antikorupsi](#)
- [Prinsip-Prinsip Perilaku Bisnis \(PBC\)](#)
- [Kode Perilaku Mitra Bisnis](#)
- Unit Bisnis – Kebijakan dan Prosedur khusus